

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL

**(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia
pada Tahun 2020)**

THE EFFECT OF ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE AND GENERAL ALLOCATION FUNDS OF CAPITAL EXPENDITURE (Case Study On District And City in Indonesia in 2020)

Ajeng Eka Prihastuti¹, Sri Rahayu²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

ajengekaprihastuti@student.telkomuniversity.ac.id¹, sriahayu@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Belanja modal adalah pengeluaran suatu anggaran untuk memperoleh aset tetap berwujud yang memberikan suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja modal untuk perolehan peralatan dan mesin, tanah, jaringan, gedung dan bangunan, dan dalam bentuk fisik lainnya. Belanja Daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia pada Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan data yang diambil adalah sekunder. Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota, teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik perposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 258 Pemerintah kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia tahun 2020. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan IBM SPSS 25 sebagai alat uji statistik dan hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. sedangkan secara parsial pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal

Abstract

Capital expenditure is the expenditure of a budget to obtain tangible fixed assets that provide a benefit for more than one accounting period. Capital expenditures consist of capital expenditures for the acquisition of equipment and machinery, land, networks, buildings and structures, and in other physical forms. Regional Expenditures are broken down by regional government affairs, organizations, programs, activities, groups, types, objects, and details of spending objects.

This research aims to find out the influence of Regional Original Income, General Allocation Fund on Capital Expenditure in Regency and City Governments throughout Indonesia in 2020. The method used is quantitative with the data taken is secondary. The population in this study is the Regency and City Government, the sampling technique in this study uses perposive sampling techniques with a sample number of 258 district and city governments throughout Indonesia in 2020. The analysis method used is multiple regression analysis using IBM SPSS 25 as a statistical and hypothesis test tool.

The results showed that the original income of the region, general allocation fund simultaneously affected capital expenditure. while partially the original income of the region and the rest of the budget financing positively affect capital expenditure. The variable general allocation fund has no effect on capital expenditure.

Keywords: Original Local Government Revenue, General Allocation Funds, Capital Expenditure

1. Pendahuluan

Belanja modal yaitu semua pengeluaran negara yang telah dilakukan untuk pembentukan suatu modal dalam bentuk peralatan dan mesin, tanah, jaringan, gedung dan bangunan, dan dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal sangat harus diperhitungkan karena adanya kaitan dengan keberlangsungan semua pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Dapat dikatakan bahwa belanja modal merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas agar menunjang kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik[1]. Pemanfaatan suatu belanja hendaknya dapat dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misalnya dengan melakukan aktivitas pembangunan. Pengalokasian suatu anggaran belanja modal dinyatakan berhasil apabila pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang digunakan dalam perihal yang efisien dan efektif dimisalkan untuk pembangunan[2]. Adapun masalah yang terjadi mengenai belanja modal dimana realisasi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota pada tahun 2020 semester 1 mengalami penurunan. Berikut data realisasi belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia tahun 2019-2020:

Tahun	Belanja Modal
2019	Rp168.899.997.913
2020	Rp159.893.861.430

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1. Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia Tahun 2019-2020

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp159.893.861.430, sedangkan pada tahun 2019 realisasi belanja modal sebesar Rp168.899.997.913, maka jika dilihat dari tabel 1.1 realisasi belanja modal tahun 2020 bisa dikatakan lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan bahwa penyerapan belanja yang rendah terjadi lantaran banyaknya kepala daerah yang cenderung berhati-hati dalam menggunakan anggaran yang telah diberikan, hal tersebut dilakukan demi menjaga arus kas keuangan setiap daerah karena kepala daerah masih belum yakin dengan potensi pendapatannya dimasa mendatang. Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga menyatakan bahwa Penyerapan belanja dikatakan rendah juga bisa disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana seperti realisasi pendapatan daerah yang menurun. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia sedang menerapkan peraturan social distancing dan *work from home* untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19, sehingga banyaknya tempat-tempat atau lainnya yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah tidak bisa beroperasi dengan baik. Dampak dari rendahnya belanja modal yaitu infrastruktur yang ada, tidak memadai dan tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang menyebabkan para investor swasta nasional maupun investor asing enggan berinvestasi di daerah tersebut sehingga perekonomian daerah tidak berkembang yang akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan akan selalu bergantung dari APBN dan APBD sebagai penggerak utama perekonomian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belanja modal, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua faktor yaitu pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum alasan peneliti memilih tiga faktor tersebut dikarenakan terdapat hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya.

2. Dasar Teori dan Metode Penelitian

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Belanja Modal

Belanja modal adalah anggaran yang dikeluarkan untuk suatu kegiatan pemerintah pusat atau daerah yang memiliki manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi[3]. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset lainnya}$$

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang didapatkan oleh daerah dengan memungutnya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan[4]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tulang punggung dari pembiayaan daerah, dikarenakan itu kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan berpengaruh terhadap perkembangan serta pembangunan daerah tersebut [5]. Semakin besar kemampuan suatu daerah untuk mendapatkan serta menggali Pendapatan Asli Daerahnya maka semakin besar juga dana yang dapat dialokasikan kepada pengeluaran suatu daerah untuk meningkatkan belanja modal yang sesuai dengan keperluan pembangunan. Sehingga PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena semakin besarnya suatu PAD yang diperoleh suatu daerah maka semakin besar juga peluang pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan, sarana, dan prasarana[6].

2.1.3 Dana Alokasi Umum

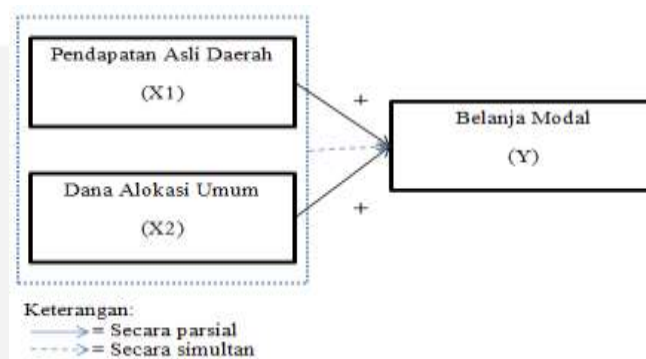
Dana Alokasi umum (DAU) merupakan salah satu dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan yang bertujuan atas pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan digunakan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi[3].

Dana Alokasi Umum = Celah fiskal + Alokasi dasar

Dimana,

Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal daerah

Pembagian Dana Alokasi Umum daerah dapat dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang didapatkan dari selisih kebutuhan daerah dengan kemampuan yang dimiliki oleh daerah[1]. Pemberian dana alokasi umum yang diberikan untuk daerah apabila memiliki keuangan yang mencukupi namun keperluan dalam hal keuangannya kecil maka akan mendapatkan anggaran DAU yang kecil, begitu pula sebaliknya apabila anggaran DAU yang diberikan semakin besar maka belanja modal yang akan dianggarkan akan semakin besar[7]. Sehingga DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena ketika Dana Alokasi Umum (DAU) tinggi maka akan memberikan dana alokasi yang lebih besar juga pada belanja modal. Dengan begitu maka ketika anggaran dari dana alokasi umum meningkat maka belanja modal akan meningkat juga.



Sumber: Data yang telah diolah (2021)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah yang diperoleh melalui Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia tahun 2020.. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu perpositive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 220 sampel data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS 25. Berikut model persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini :

$$Y = \alpha + PADX1 + DAUX2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	=	Belanja Modal
X1	=	Pendapatan Asli Daerah
X2	=	Dana Alokasi Umum
ε	=	Error Term
α	=	Konstanta

3. Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis sebuah data untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai nilai rata-rata, maksimum, minimum dan standar deviasi. Analisis Deskriptif dalam penelitian ini akan menggambarkan variabel pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2), dan belanja modal (Y).

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	258	22,21	28,37	24,8143	1,13872
DAU	258	17,69	27,92	26,6117	,67861
BM	258	20,42	27,04	23,8566	,99530
Valid N (listwise)	258				

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS 25 (2021)

Nilai rata-rata (mean) variabel dependen yaitu belanja modal sebesar 23,8566, rata-rata tersebut lebih besar dari standar deviasi dengan nilai sebesar 0,99530, hal ini menunjukkan bahwa data belanja modal pada kabupaten dan kota di seluruh Indonesia tahun 2020 tidak bervariasi (cenderung mengelompok). Pada tabel diatas telah disajikan nilai maksimal dan minimal dengan nilai sebesar 27,04 (553.163.090.360) dan 20,42 (737.727.900) dimana nilai maksimal terdapat pada Kabupaten Tangerang dan nilai minimum terdapat pada Kota Tanjung Balai. Nilai rata-rata variabel independen yang pertama yaitu pendapatan asli daerah sebesar 24,8143, rata-rata tersebut lebih besar dari standar deviasi dengan nilai sebesar 1,13872, hal ini menunjukkan bahwa data PAD tidak bervariasi (cenderung mengelompok). Pada tabel diatas telah disajikan nilai maksimal dan nilai minimal dengan nilai 28,37 (2.096.674.213.412) dan 22,21 (4.438.211.847) dimana nilai maksimal terdapat pada Kabupaten Tangerang dan nilai minimal terdapat pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Nilai rata-rata variabel independen yang kedua yaitu dana alokasi umum sebesar 26,6117, rata-rata tersebut lebih besar dari standar deviasi dengan nilai sebesar 0,67861, hal ini menunjukkan bahwa data DAU tidak bervariasi (cenderung mengelompok). Pada tabel diatas telah disajikan nilai maksimal dan nilai minimal dengan nilai sebesar 27,92 (1.338.247.898.000) dan 17,69 (48.140.194) dimana nilai maksimal terdapat pada Kabupaten Tangerang dan nilai minimal terdapat pada Kabupaten Ketapang.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Distribusi normal dalam penelitian ini yaitu terdetekdinya dengan menggunakan statistik non parametrik Kolmogorov Smimov (K-S).

Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		258
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,89756793
Most Extreme Differences	Absolute	,048
	Positive	,028
	Negative	-,048
Test Statistic		,048
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data SPSS 25 diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi 0,200 lebih dari $\alpha = 0,05$, berarti data terdistribusi secara normal, dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terdapat korelasi yang terjadi antar variabel dalam data yang diteliti. Data dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai *variance inflation factor* atau VIF >10 dan nilai *Tolerance* <0,1

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,740	2,248		5,222	,000		
	PAD	,339	,053	,368	6,378	,000	,862	1,159
	DAU	,139	,089	,095	1,561	,120	,862	1,159

a. Dependent Variable: BM

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data SPSS 25 diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *variance inflation factor* (VIF) dari ketiga variabel yaitu PAD sebesar 1,159, dan DAU sebesar 1,159. Dari hasil tersebut ketiga variabel memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Kemudian, dapat diketahui nilai *Tolerance* dari ketiga variabel, yaitu pendapatan asli daerah sebesar 0,862, dana alokasi umum 0,862, nilai *Tolerance* dari ketiga variabel tersebut lebih besar dari 0,10 sehingga dapat dikatakan kedua variabel pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

3.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada *t-1*. Metode *Durbin-Watson* dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi, asumsi terpenuhi apabila nilai DW > 0,05. Hasil uji autokorelasi berdasarkan data yang diuji ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,432 ^a	,187	,180	,90108	1,799

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

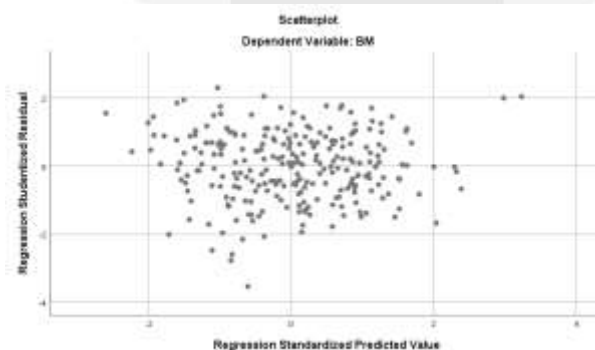
b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data SPSS 25 diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,799, hal tersebut berarti bahwa data yang telah diuji pada penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.



Gambar 2. Diagram Scatterplot Heteroskedastisitas

Sumber: Data SPSS 25 diolah (2021)

Berdasarkan dengan grafik scatter plot diatas dapat terlihat bahwa titik variance menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam pengujian ini.

3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil output SPSS 25 diperoleh nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear sebagai berikut:

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	11,740	2,248	5,222	,000
	PAD	,339	,053	,388	,6378
	DAU	,139	,089	,095	,120

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data SPSS 25 diolah (2021)

$$Y = 11,740 + 0,339 X_1 + 0,139 X_2 + \varepsilon$$

Penjelasan persamaan regresi:

1. Nilai konstanta yang didapat sebesar 11,740 artinya jika variabel independen pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran diabaikan atau bernilai 0, maka besarnya nilai variabel dependen belanja modal adalah 11,740.
2. Nilai koefisien regresi pada variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,339 memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar satu satuan dan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,339 satuan.
3. Nilai koefisien regresi pada variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,139 memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadinya peningkatan dana alokasi umum sebesar satu satuan dan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,139 satuan.

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Koefisiensi Determinasi

Tabel 5. Hasil Pengujian Koefisiensi Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,432 ^a	,187	,180	,90108	1,799

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data SPSS 25 diolah (2021)

Berdasarkan hasil pengujian koefisiensi determinasi pada tabel diatas diperoleh nilai R² sebesar 0,180 atau 18%. Hal tersebut berarti bahwa variasi dari belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia pada tahun 2020 yang dapat dijelaskan oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran ialah sebesar 18%, sedangkan sisanya sebesar 82% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

3.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 6. Hasil Pengujian Statistik F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	47,543	2	23,771	29,277	,000 ^b
Residual	207,046	255	,812		
Total	254,589	257			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber: Data SPSS 25 diolah (2021)

Berdasarkan pada tabel diatas hasil pengujian secara simultan (Uji F) dapat dilihat pada nilai signifikansi dengan nilai sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0.05 (5%) yang artinya variabel independen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu belanja modal, atau juga bisa diartikan pendapatan asli daerah (X1), dan dana alokasi umum (X2) mempunyai pengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia tahun 2020.

3.4.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 7. Hasil Pengujian Statistik t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11,740	2,248		,000
	PAD	,339	,053	,368	,000
	DAU	,139	,089	,095	,120

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data SPSS 25 diolah (2021)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil pengujian dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0.120 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal tersebut berarti bahwa dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan pengujian analisis regresi berganda, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- A. Berdasarkan uji statistik deskriptif, diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. Belanja Modal tahun 2020 pada kabupaten dan kota di seluruh Indonesia memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 23,8566, rata-rata tersebut lebih besar dari standar deviasi dengan nilai sebesar 0,99530, hal ini menunjukkan bahwa data belanja modal pada kabupaten dan kota di seluruh Indonesia tahun 2020 tidak bervariasi (cenderung mengelompok). Pada tabel diatas telah disajikan nilai maksimal dan minimal dengan nilai sebesar 27,04 (553.163.090.360) dan 20,42 (737.727.900) dimana nilai maksimal terdapat pada Kabupaten Tangerang dan nilai minimum terdapat pada Kota Tanjung Balai..
 2. Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 pada kabupaten dan kota di seluruh Indonesia memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 24,8143, rata-rata tersebut lebih besar dari standar deviasi dengan nilai sebesar 1,13872, hal ini menunjukkan bahwa data PAD tidak bervariasi (cenderung mengelompok). Pada tabel diatas telah disajikan nilai maksimal dan nilai minimal dengan nilai 28,37 (2.096.674.213.412) dan 22,21 (4.438.211.847) dimana nilai maksimal terdapat pada Kabupaten Tangerang dan nilai minimal terdapat pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 3. Dana Alokasi Umum tahun 2020 pada kabupaten dan kota di seluruh Indonesia memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 26,6117, rata-rata tersebut lebih besar dari standar deviasi dengan nilai sebesar 0,67861, hal ini menunjukkan bahwa data DAU tidak bervariasi (cenderung mengelompok). Pada tabel diatas telah disajikan nilai maksimal dan nilai minimal dengan nilai sebesar 27,92 (1.338.247.898.000) dan 17,69 (48.140.194) dimana nilai maksimal terdapat pada Kabupaten Tangerang dan nilai minimal terdapat pada Kabupaten Ketapang.
- B. Berdasarkan pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia Tahun 2020.
- C. Berdasarkan pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia Tahun 2020.
2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia Tahun 2020.

REFERENSI

- [1] Ilma, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal. 1–8.
- [2] Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol., 7(3), 1255–1281.
- [3] Mahadifa, N. A. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017).
- [4] Neaviesah, M. S. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017)*. 1–8.
- [5] *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. (n.d).
- [6] Sari, D. G. Y. A., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntans*, 9(1), 15–29.
- [7] Suryana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2), 67–74.
- [8] *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. (n.d).

